PERUBAHAN RENCANA KERJA PD
TAHUN 2022

BANDUNG BEDAS!

PERATURAN
BUPATI BANDUNG

NOMOR ..... TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN

RENJA PD TAHUN 2022

KECAMATAN CIKANCUNG
KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

Guna memenuhi ketentuan sebagaima diatur dalam permendagri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah, Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai acuan untuk melakukan analisis kebutuhan tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja ini merupakan sebuah proses menuju perencanaan kerja yang konfrehensif guna menjalankan program dan kegiatan di Kecamatan Cikancung Tahun 2022.

Bahwa Perencananan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Cikancung sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visi dan Misi kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026

Semoga Perubahan Rencana Kerja ini berguna bagi Kecamatan Cikancung dan dapat mendukung terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten bandung dan semoga pula apa yang direncanakan sesuai dengan realita yang ada dan mampu berkontribusi terhadap capaian target indikator Utama di Kabupaten bandung

Cikancung, 01 Agustus 2022

CAMAT CIKANCUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KEC. CIKANCUNG

M A K S U M. S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 19640722 198403 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **1**

DAFTAR ISI **2**

BAB I PENDAHULUAN **3**

1.1 Latar Belakang **3**

1.2 Landasan Hukum **4**

1.3 Maksud dan Tujuan **5**

1.4 Sistematika Penulisan **6**

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU **8**

2.1 Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah **8**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah **33**

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah **34**

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja RKPD **37**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan **50**

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **56**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional **56**

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah **60**

3.3 Program Kegiatan **61**

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **63**

BAB V PENUTUP **72**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah pada paragraf 2 yang mengatur tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disebutkan pada pasal 126 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, paling lambat minggu pertama bulan Desember, sehingga Rencana Kerja Renja merupakan bagian yang harus dilaksanakan dari proses perencanaan kerja perangkat Daerah termasuk Kecamatan dan ranwal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan darfi sebuah perencanaan kerja di tingkat perangkat daerah.

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 209, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni, “Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan..

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi yang secara melekat dan diberiakn berdasarkan Undang – undang (kewenangan Atributif) dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan (Kewenangan Delegatif),Tugas dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kecamatan, Tugas dan Kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi camat yang sekaligus merupakan tugas dan fungsi Kecamatan diperlukan adanya Rencana Strategis (Renstra) yang secara substansi meliputi adanya Tujuan dan Sasaran yang menggambarkan adanya Target yang akan

dicapai sebagai acuan dalam pengukuran kinerja sehingga memberikan gambaran terhadap capaian kinerja untuk setiap tahunnya.

Sebagai bagian dari Perencanaan, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun 2022 disusun berdasarkan kebutuhan yang berdasarkan permasalahan yang ada dan perlu penanganan sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi optimal dan mendukung terhadap tugas Atributif yang diemban kecamatan serta dalam rangka menjalankan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada camat

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten,

Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep. 580 -Adpem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, terdapat 29 Bidang Pelimpahan, 23 sub bidang Pelimpahan, dan 321 Rincian Pelimpahan dengan Pelimpahan berupa Pelaksanaan, Koordinasi, Rekomendasi, Pembinaan, dan Fasilitasi (Perizinan dan Non Perizinan)

Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja guna memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Perubahan Rencana Kerja merupakan Dokumen Penting dan strategis dan merupakan proses perencanaan sehingga menjadi variabel yang sangat strategis dalam perencanaan, disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Peyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun 2022 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang akan dicapai meskipun secara substansi mengalami kendala dikarenakan belum tersusunya Rencana Strategis untuk 5 (lima) Tahun ke depan, dan akan dilakukan penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Strategis dan juga menyeleraskan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka menengah nasional
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017.
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung
11. Keputusan Bupati Bandung Nomor :137.1/Kep.783.Otda/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 050/474/Bappeda Tanggal 24 Februari 2021 Tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Tahun 2022 Perubahan

2. Sebagai pedoman dan arah meiaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Prioritas Kabupaten Bandung
3. Sebagai tolak ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Cikancung

1.4. Mekanisme Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapt dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Kecamatan Cikancung, proses penyusunan Renja Kecamatan Cikancung, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Cikancung Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Cikancung
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikancung
2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cikancung
2.4 Review Terhadap Perubahan Rencana Kerja RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikancung

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Cikancung

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Cikancung Tahun Lalu

Guna menunjang terhadap kondisi objektif terhadap data Umum Kecamatan Cikancung guna menunjang kinerja pembangunan sekaligus guna melengkapi evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana kerja Tahun lalu atau Tahun 2021 dan perkiraan capaian Tahun berjalan (Tahun 2022) berikut Data Umum Kecamatan Cikancung :

A. Gambaran Umum Daerah

Kecamatan Cikancung sebagai salah satu Kecamatan dari 31 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, secara topograpis merupakan daerah pegunungan dengan nuansa alam yang sangat indah, Kecamatan Cikancung memiliki ketinggian 1.200 meter diatas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 2.149 mm/tahun dengan suhu udara minimal 15 derajat Celcius maksimal 20 derajat celcius. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat : Kecamatan Rancaekek
2. Sebelah Timur : Kecamatan Kabupaten Garut
3. Sebelah Utara : Kecamatan Paseh
4. Sebelah Selatan : Kecamatan Cicalengka

Kecamatan Cikancung Luas wilayah 3.535 ha yang terdiri dari tanah sawah, tanah kering/tegalan, tanah teh rakyat, tanah Basah dan Tanah hutan, dengan penyebaran wilayah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Luas Wilayah Desa di Kecamatan Cikancung

NO	DESA	Luas Wilayah	Satuan Wilayah
1	Hegarmanah	321,30	Hektar
2	Cikasungka	218,30	Hektar
3	Tanjunglaya	389,20	Hektar
4	Mandalasari	800	Hektar
5	Cikancung	759,8	Hektar
6	Cihanyir	346,2	Hektar
7	Mekarlaksana	700,2	Hektar
8	Srirahayu	700,4	Hektar
9	Ciluluk	476,5	Hektar
Jumlah			Hektar

**) : Sumber data berasal dari Seksi Pemerintahan Per 31 Desember Tahun 2021*

Dengan pembagian Wilayah penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pembagian Wilayah di Kecamatan Cikancung

NO	DESA	RT	RW	DUSUN	LAKI-LAKI*)	PEREMPUAN*)	JUMLAH*)
1	Hegarmanah	78	21	4	6.329	7.161	13.490
2	Cikasungka	82	30	7	8.785	7.537	16.322
3	Tanjunglaya	84	23	3	6.362	5.996	12.358
4	Mandalasari	94	29	6	8.617	7.654	16.271
5	Cikancung	62	14	4	4.850	4.221	9.071
6	Cihanyir	50	13	3	4.626	3.441	8.067
7	Mekarlaksana	56	22	4	6.881	7.295	14.176
8	Srirahayu	30	15	3	5.196	6.093	11.289
9	Ciluluk	31	20	4	5.184	6.997	12.181
Jumlah		**567**	**187**	**74**	**56.830**	**56.395**	**113.225**

**) : Sumber data berasal dari Seksi Pemerintahan Per 31 Desember Tahun 2021*

A. 1. Tugas dan Fungsi Perangkat

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan dapat mengkoorkinasikan semua urusan pemerintahan.Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa *Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/ Kota*, sedangkan kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa *Kecamatan dibentuk bertujuan untuk meningkatkankoordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaanmasyarakat Desa/ Kelurahan.* Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Kecamatan dalam pasal 10 ditegaskan *bahwa Camat dalam memimpin Kecamatan tugas :*

(1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
(2) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
(3) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
(4) mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan Perda dan Perkada;
(5) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
(6) mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
(7) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
(8) melakukan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten;
(9) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-udangan.

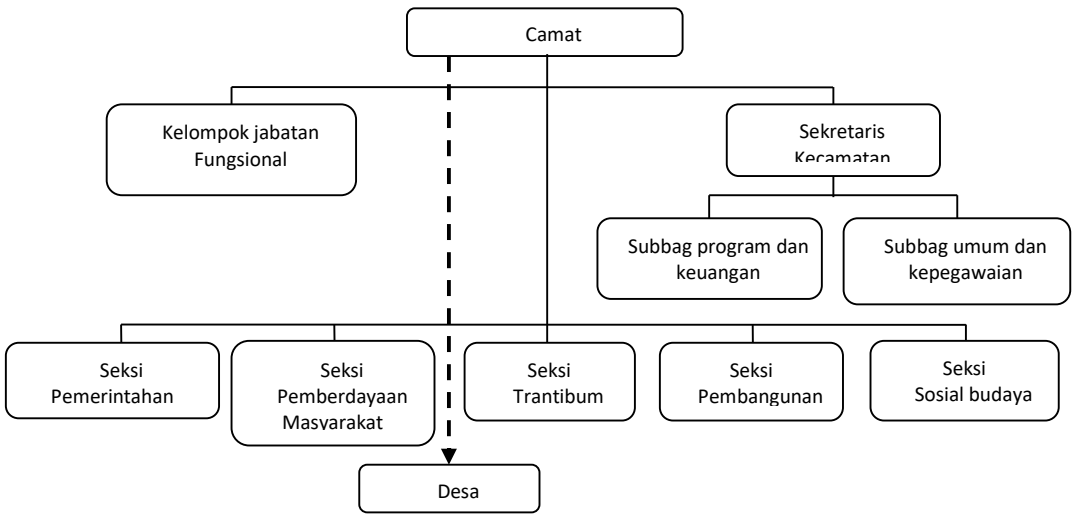
Kecamatan dibentuk dan disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan,

mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan, sedangkan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat diatur melalui Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1 / Kep.580-Adpem/ 2016 Tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat, menjelaskan bahwa Pelimpahan urusan Pemerintahan adalah Pendelegasian atau Penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk memberikan Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi, Penyelenggaraan, Pengawasan, Penetapan serta Pengumpulan Data dan Informasi dan Kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan.

A. 2. Struktur Organisasi

Struktur organisai Kecamatan dikatagorikan sebagai teritorial organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016, berikut di ilustrasikan struktur organisasi yang dimaksud :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Cikancung



Dengan komposisi pegawai sebagai berikut :

Tabel 1.3 :
Data Kepegawaian Kecamatan Cikancung

No	Nama	Jabatan	Gol	Pendidikan	Diklat Kepemimpinan
1	Maksum. S.Sos	Camat	IV/b	Sarjana	Diklatpim TK.III
2	Dikky Darmawan, S.Sos., M.Si	Sekretaris Kecamatan	III/d	Pasca Sarjana	Diklatpim TK.III
3	AL Azhar, S.Sos	Kasi Trantibum	III/d	Sarjana	Diklatpim TK.IV
4	Bondod Santoo S.Ip	Kasi Pembangunan	III/c	Sarjana	Diklatpim TK.IV

5	H.Aries Rismana M,S.Sos,M.M	Kasi Pemerintahan	III/d	Pasca Sarjana	Diklatpim TK.IV
6	Yani Sri Heryani.BSW	Kasi Pemberdayaan Masyarakat	III/d	Sarjana	Diklatpim TK.IV
7	Asep Haedar Dimyati, S.Pd	Kasi Sosial Budaya	III/d	Pasca Sarjana	Diklatpim TK.IV
8	Tatang Suarsa, S.Pd	Kasubag Um.Peg	III/c	Pasca Sarjana	Diklatpim TK.IV
9	Alit Mahmudin	Kasubag Prog.Keu	III/a	SMA	Diklatpim TK.IV
10	Haris Mulyana	Pengelola Keamanan Dan Ketertiban	II/d	SMA	-
11	Yusup	Adm Kependudukan	II/d	SMA	-
12	Asep Saiful Bahri	Pengelola Bantuan Keuangan PemDes	II/c	SMA	-
13	Usup	Penata Lapran Keuangan	II/c	SMA	-
14	Yuda Aria Kangka, AMd.Kom	Pegolah Data Aplikasi dan Pengelolaan System Keuangan	II/c	D/III	-
15	Dudi Iskandar	Pengelola Dokumentasi	II/b	SMA	-
16	Imas Masitoh S. S.Sos	Pengelola Layanan Operasional	III/a	Sarjana	-
17	Edi Rustandi	Bendahara Penerimaan	II/b	SMA	-
18	Asep Heri Perana	Penyusun Program Anggaran dan pelaporan	II/b	Sarjana	-
19	Gilang Perkasa	PengelolaPemanfaatan BMD	II/b	SMA	-
20	Komarudin	Bendahara Pengeluaran	II/b	SMA	-
21	Iyep Rohim	Pengadministrasian Sarana Parasarana	II/a	SMA	-
22	Wawan Diana	Pengelola PBB,P2 dan BPHTB	I/d	SMA	-
23	Ende Yaya	Pengelola Layanan Operasional	I/b	SMP	-
24	Entis	Petugas Keamanan	I/b	SD	-
25	Raden Syaripudin	Pengandministrasi Umum	II/b	SMA	-
26	Iwan Setiawan	Petugas Keamanan	II/b	SMA	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 31 Desember 2021

B. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI

1. Pelayanan Masyarakat

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga

negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu citra pelayanan yang diberikan oleh kecamatan kepada masyarakat merupakan citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung pada umumnya. Perbaikan dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang seharusnya dilakukan.

Dalam rangka optimalisasi peran strategis pelayanan kecamatan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana ada azas-azas pelayanan publik yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Kepentingan umum;
b. Kepastian hukum;
c. Kesamaan hak;
d. Keseimbangan hak dan kewajiban;
e. Profesionalisme;
f. Partisipatif;
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. Keterbukaan;
i. Akuntabilitas;
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. Ketepatan waktu; dan
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan;

Peran dan fungsi kecamatan menjadi pusat pelayanan masyarakat dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bandung, Hal itu menunjukan tekad dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 5 menyebutkan bahwa kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memiliki persyaratan subtantif, administratif dan teknis. Secara subtantif kecamatan telah menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari Kabupaten Bandung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 137.1/Kep. 580 -Adpem/2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Cikancung yang salah satunya

di bidang perizinan dan non perizinan. Persyaratan administratif juga telah dipenuhi dengan adanya Standar Pelayanan Publik (SPP) Kecamatan dan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung,

Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 disebutkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, salah satunya adalah kelengkapan sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika).

Kecamatan Cikancung telah dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak), yang seharusnya mendukung dalam menunjang pelaksanaan kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun pelayanan kepada masyarakat, namun demikian sangat disadari bahwa sarana dan prasarana yang ada perlu adanya perbaikan dan pengadaan peralatan baru maupun rehab ruang pelayanan.

Pelayanan PATEN di Kecamatan Cikancung pada saat ini kurang berfungsi dengan baik dikarenakan oleh adanya perangkat keras yang rusak dan Jaringan yang tidak cukup memadai. Sehingga Pelayanan menjadi kurang maksimal dan optimal, untuk mengatasi hal tersebut untuk Tahun 2022 Perubahan akan dilakukan Perbaikan dengan Biaya dari DPA Murni TA 2022,

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam suatu pengambilan kebijakan yang juga dapat diartikan sampai dengan pelaksanaan kegiatan atau pengawasannya. Pengambilan kebijakan kecamatan yang diawali atau dimulai dari proses musyawarah pembangunan (musrenbang) tingkat Desa dan kecamatan jelas telah melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan merupakan hasil dari masukan dan usulan masyarakat melalui musyawarah pembangunan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan kecamatan antara lain berupa, penyuluhan, sosialisasi, Bimbingan peningkatan kapasitas Lembaga Desa, Lembaga Kemasyarakat Desa dan kader masyarakat atau kelompok masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya sasaran dan pelaksananya dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung, sehingga sebenarnya dalam hal ini keterlibatan masyarakat diawali dari proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pada awal tahun sebelumnya, pada saat pelaksanaan kegiatan sampai pada monitoring dan evaluasi kegiatan.

Bahwa dengan paradigma pembangunan berbasis masyarakat, pemerintah kecamatan telah mendorong lembaga Desa agar dalam pelaksanaan musrenbang di tingkat Desa dapat mengakomodir semua kepentingan dengan tetap memperhatikan skala prioritas

Untuk pemberdayaan kelembagaan, sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan dalam pemberdayaan telah dilaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan guna pemberdayaan lembaga yang ada di Desa agar lembaga yang ada di tingkat Desa dan Kecamatan dapat lebih berdaya dalam menunjang kinerja pembangunan.

Kewenangan dalam tugas umum Pemerintahan salah satunya yang tidak kalah penting adalah ketenteraman dan ketertiban umum, dalam hal ini camat melalui FORKOPIMCAM telah melakukan Koordinasi, Fasilitasi dan Pembinaan terhadap pemangku kepentingan yang salah satunya diimplementasikan melalui Koordinasi Unsur Pimpinan Forkopimcam dan pembinaan terhadap satuan Linmas Desa serta Linmas Kecamatan.

3. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Kecamatan Cikancung yang merupakan Wilayah yang perkembangannya pesat sejalan dengan Kegiatan Pembangunan Oleh Pemerintah Kabupaten Bandung dan selain itu Wilayah Kecamatan Cikancung dilalui oleh adanya Jalan Nasional maka telah berdampak positif terhadap perkembangan usaha di Kecamatan Cikancung, hal tersebut seharusnya menunjang terhadap PAD Daerah, dan selain itu telah bertambahnya Penduduk berdampak terhadap rumah hunian warga yang terus bertambah, namun disisi lain hal tersebut belum menunjang terhadap adanya PAD khusunya dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang luasnya menjadi Kewenangan Camat.

Untuk mengatasi Pencapaian Target dari PAD dari Retribusi Perizinan diperlukan adanya sosialisasi yang terus menerus dan berkesinambungan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan untuk mengatasi Target PAD dari alat berat Stoom Wals, Kecamatan Cikancung telah mengusulkan untuk mengganti Stoom Wals dialihkan ke Excavator mini yang berfungsi untuk penataan/Perataan Lahan, Pembuatan Drainase dan keperluan lainnya sesuai dengan kegunaan excavator itu sendiri dan hal tersebut perlu dilakukan mengingat relevansi yang ada pada saat ini.

Dan khusus untuk Retribusi dari Pengusaha yang menjadi kewenangan Pemkab perlu adanya pendataan secara periodik dan dari pihak terkait atas Retribusi Usaha Jenis Hotel dan Restoran maupun Rumah Makan.

Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama memberikan gambaran :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja tidak ada dikarenakan program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Secara Keseluruhan Target Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat kegiatan yang penyerapannya hanya 85,74 persen namun dalam capaian kinerjanya mencapai 100% , hal tersebut dikarenakan pada anggaran tersebut kegiatanya sebagian dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi Covid - 19 sehingga anggaran yang ada tidak terserap 100%.

Realisasi Program dan Kegiatan yang menunjang terhadap capaian Kinerja Tahun Anggaran 2021

NO	Program/Kegiatan/Subkegiatan PD	Target Angggaran 2021	Realisasi Anggaran 2021	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.917.037.816**	**4.215.945.839**	**85,74%**	**Menungjang**
2	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**2.999.706**	**2.980.500**	**99,36%**	**Menungjang**
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.999.706	2.980.500	**99,36%**	**Menungjang**
4	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.335.200.381**	**3.701.741.275**	**85,39%**	**Menungjang**
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.324.938.977	3.691.521.775	**85,35%**	**Menungjang**
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.996.460	4.979.000	**99,65%**	**Menungjang**
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.499.722	2.487.500	**99,51%**	**Menungjang**

8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.765.222	2.753.000	**99,56%**	**Menungjang**
9	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**20.160.000**	**20.160.000**	**100,00%**	**Menungjang**
10	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.160.000	20.160.000	**100,00%**	**Menungjang**
11	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**104.475.939**	**73.616.500**	**70,46%**	**Menungjang**
12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	2.100.000	**70,00%**	**Menungjang**
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.887.730	45.146.500	**94,28%**	**Menungjang**
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000	6.000.000	**100,00%**	**Menungjang**
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.585.600	14.832.000	**46,96%**	**Menungjang**
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.002.609	2.988.000	**49,78%**	**Menungjang**
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	2.550.000	**42,50%**	**Menungjang**
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.000.000	**-**	**0,00%**	**Menungjang**
19	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**37.500.000**	**31.500.000**	**84,00%**	**Menungjang**
20	Pengadaan Mebel	34.000.000	31.500.000	**92,65%**	**Menungjang**
21	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000	-	**0,00%**	**Menungjang**

22	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**297.883.810**	**277.281.164**	**93,08%**	**Menungjang**
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	1.862.700	**31,05%**	**Menungjang**
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.253.810	10.669.200	**65,64%**	**Menungjang**
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	275.630.000	264.749.264	**96,05%**	**Menungjang**
26	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**118.817.980**	**108.666.400**	**91,46%**	**Menungjang**
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8.000.000	3.100.000	**38,75%**	**Menungjang**
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.867.500		**0,00%**	**Menungjang**
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.950.480		**0,00%**	**Menungjang**
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	106.000.000	105.566.400	**99,59%**	**Menungjang**
31	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**64.319.850**	**54.456.600**	**84,67%**	**Menungjang**
32	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**64.319.850**	**54.456.600**	**84,67%**	**Menungjang**
33	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	9.840.600	9.840.600	**100,00%**	**Menungjang**
34	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	54.479.250	44.616.000	**81,90%**	**Menungjang**
35	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**10.543.500**	**8.200.500**	**77,78%**	**Menungjang**

36	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**10.543.500**	**8.200.500**	**77,78%**	**Menungjang**
37	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10.543.500	8.200.500	**77,78%**	**Menungjang**
38	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**79.008.467**	**74.264.100**	**94,00%**	**Menungjang**
39	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**79.008.467**	**74.264.100**	**94,00%**	**Menungjang**
40	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	30.571.767	30.342.000	**99,25%**	**Menungjang**
41	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.332.700	30.332.700	**100,00%**	**Menungjang**
42	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	18.104.000	13.589.400	**75,06%**	**Menungjang**
		5.070.909.633	**4.352.867.039**	**85,84%**	**Menungjang**

3. **Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Pada capaian Program dan Kegiatan terdapat capaian yang melebihi dari target, yaitu pada pelaksanaan kegiatan Kewenangan yang dilimpahkan (KDH), dimana kegiatan melampaui target, hal tersebut terjadi dari adanya koordinasi yang baik antar instansi di Kecamatan sehingga kegiatan melampaui target..

4. **Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.**

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kegiatan meskipun ada namun bisa diatasi dengan monitoring dan evaluasi intern dan ditindak lanjuti dengan Koordinasi dengan pihak terkait., kendala tersebut adalah adanya pada pelayanan KTP dan KK

5. **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.**

Capaian Kinerja di Kecamatan Cikancung yang secara keseluruhan mencapai 100% tentu ada akan ada implikasi negatip terhadap Renstra, namun demikian kesesuaian pada pagu Anggaran terdapat seslisih capaian sebagaimana disebutkan di atas, namun hal tersebut tidak berakibat terhadap kineja.

6. **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut.**

Meskipun Kendala pada pelaksanaan Program/Kegiatan berjalan lancar namun masih terdapat kendala atau adanya sebuah Resiko yang dapat menghambat terhadap capaian Kinerja antara lain :

a. Paktor Pelayanan Publik belum berjalan secara optimal dikarenakan adanya sarana dan prasarana yang emngalami kerusakan
b. SDM aparatur khususnya dalam bidang pelayanan Publik
c. Perubahan Kebijakan/Aturan

Data Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu (2021) sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 2.1 (TC.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Cikancung dan

Pencapaian Renstra Kecamatan Cikancung s/d Tahun 2022 (tahun berjalan)*
Kabupaten Bandung

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 - 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangka Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran (%)		Realisai Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7				**KECAMATAN**									

7	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**- Nilai SAKIP - Nilai BMD**	**- 69,90 - 80**	**-67,14 -73,61**	**-65,02 -80**			**- 68 - 80**	**- 68 - 80**	
7	**1**	**2,01**	**0**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**500%**	**100%**	**100%**			**100%**	**0%**	**0,00%**
7	1	2,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	1 dokumen				2 dokumen	0	**0,00%**
7	1	2,01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 dokumen	1 dokumen						**0,00%**
7	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	0	**0,00%**
7	**1**	**2,02**	**0**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**500%**	**100%**	**100%**			**100%**	**50%**	**10,00%**

7	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1500 Orang	300 Orang	300 Orang			300 Orang	150	**10,00%**
7	1	2,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			1 Laporan	0	**0,00%**
7	1	2,02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan	6	**10,00%**
7	1	2,02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dokumen	1 dokumen	1 dokumen			1 dokumen	0	**0,00%**
7	**1**	**2,03**	**0**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			**100%**					**0,00%**
7	1	2,03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			1 dokumen					**0,00%**

1	**1**	**2,05**	**0**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai >=80%**	**500%**							**0,00%**
1	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket							**0,00%**
1	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 OK							**0,00%**
7	**1**	**2,06**	**0**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**500%**	**100%**	**100%**			**100%**	**20%**	**0,04%**
7	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/penerangan yang disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket			4 Paket	0	**0,00%**
7	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	70 Paket	14 Paket	14 Paket			14 Paket	7	**10,00%**
7	1	2,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	20 Paket	4 Paket	4 Paket			4 Paket	0	**0,00%**
7	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan	54 Paket	10 Paket	10 Paket			10 Paket	0	**0,00%**

7	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	2 Paket	2 Paket			2 Paket	1	**10,00%**
7	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	2 Paket			2 Paket	0	**0,00%**
7	1	2,06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Peket							**0,00%**
7	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	10 Laporan						**0,00%**
7	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	40 Laporan	40 Laporan			40 Laporan	10	**5,00%**
7	**1**	**2,07**	**0**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**500%**	**100%**	**100%**			**100%**	**0%**	**0,00%**
7	1	2,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	2 Unit				2 Unit	0	**0,00%**
7	1	2,07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Unit			0	0	**0,00%**
7	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	4 Unit	0			4 Unit	0	**0,00%**

7	**1**	**2,08**	**0**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500%**	**100%**	**100%**			**100%**	**50%**	**0,10%**
7	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan					**0,00%**
7	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan	6	**10,00%**
7	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan			12 Laporan	6	**10,00%**
7	**1**	**2,09**	**0**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**500%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**0,20%**
7	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	35 unit	7 unit	7 unit			7 unit	1	**2,86%**

7	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	1 unit	1 unit					**0,00%**
7	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24 unit	7 unit	7 unit			7 unit	0	**0,00%**
7	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	1 Unit	1 Unit			1 unit	0	**0,00%**
				Jumlah 1							**100%**	**100%**	**1,72%**
7	**2**	**0**	**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100%**	**100%**	**100%**			**100%**	**0,00**	**2,14%**
7	**2**	**2,03**	**0**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**300%**	**100%**						

7	2	2,03	1	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4 Dokumen	1 Dokumen						**0,00%**
												0%	**#DIV/0!**
7	**2**	**2,04**	**0**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**500%**	**100%**	**100%**			**100%**	**30%**	**0,06%**
7	2	2,04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen					**0,00%**
7	2	2,04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20 Laporan	3 Laporan	3 Laporan			4 Laporan	1	**5,00%**
7	**3**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**500%**	**100%**						**0,00%**

7	**3**	**2,01**	**0**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**500%**	**100%**						**0,00%**
7	3	2,01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga	5 Lembaga						**0,00%**
7	**3**	**2,03**	**0**	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**500%**	**100%**						**0,00%**
7	3	2,03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	20 Lembaga	2 Lembaga						**0,00%**
7	3	2,03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	1 Laporan						**0,00%**
7	**4**	**0**	**0**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum**	**500%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**0,20%**

7	**4**	**2,02**	**0**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase dalam pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Ketertiban Umum**	**500%**	**100%**	**100%**			**100%**	**100%**	**0,20%**
7	4	2,02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			2 Laporan	2	**20,00%**
7	**5**	**0**	**0**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**500%**	**100%**	**100%**					**0,00%**
7	**5**	**2,01**	**0**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan**	**500%**	**100%**	**100%**					**0,00%**

7	5	2,01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	525 Orang	80 OK	85 Orang					**0,00%**
7	**6**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500%**	**100%**	**100%**			**100%**	0	**0,00%**
7	**6**	**2,01**	**0**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase dalam Rangka Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**500%**	**100%**	**100%**			**100%**	0	**0,00%**
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4 Dokumen							**0,00%**
7	6	2,01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen			1 dokumen	1	**20,00%**

7	6	2,01	4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	5 Laporan	1 Laporan						**0,00%**
7	6	2,01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa monitoring Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9 Dokumen	1 dokumen						**0,00%**
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5 Dokumen	1 dokumen						**0,00%**
7	6	2,01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 dokumen	1	**20,00%**
7	6	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen		1 Dokumen					**0,00%**

7	6	2,01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	90 Orang					90 OK	90	**100,00%**

Cikancung, Juli 2022

Camat Cikancung

MAKSUM, S.Sos
NIP. 19640722 198403 1 002

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikancung

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Cikancung Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), Indikator – indikator tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Cikancung sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksankan.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga dari Indikator tersebut dapat diukur sejauhmana capaan Kinerja dalam pelaksanaan Program maupun Kegiatan.

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi klesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja., sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil Kerja dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan Implementasi dari sebuah perenccanaan

Analisis Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian Kinerja terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun berikutnya.

Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cikancung merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 2.2 (TC.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Cikancung

Kabupaten Bandung

No	Indikator	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	Indek Kepuasan Masyarakat	70	70	80,8	81	78,83	80,52	80,8	81	target indikator di renstra disesuaikan
2	Nilai AKIP	64,01	65,02	68	68,30	67,14	67,61	67,80	68,00	
3	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik	70%	70%	80%	80%	84,72%	74%	80%	80%	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

1. **Kinerja Kecamatan Cikancung**

   Kinerja Pelayanan di Kecamatan Cikancung telah berjalan sesuai dengan Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap triwulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik.

   Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan ;

   a. Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Cikancung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : 145 yang terdiri dari 30 Kewenangan dan 320 Rincian Pelimpahan, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
   b. Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain :
      1. Perizinan
      2. Non Perizinan (Penerbitan KK, KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya)
      3. Melaksanakan Program Kewilayan
      4. Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan

5. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna menghetahui tingkat Kepuasan Masyarakat nelalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya.

Permasalahan :

a. SDM Aparatur
b. tuntutan Masyarakat terhadap Pelayanan yang menginginkan kecepatan, ketapatan, kesesuaian biaya dan berkeadilan.
c. Tingkat Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Belum optimal dilaksanakan.
d. masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan
e. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
f. belum optimalnya koordinasi di tingkat Dinas/Badan dengan Kecamatan
g. permasalahan Sampah belum terkelola dengan baik
h. jauhnya jarak pusat pelayanan di Kabupaten dengan Kecamatan Cikancung
i. adanya kegiatan Galin C quari tanah
j. belum adanya pasar Tradisional dan sehat

Hambatan :

a. Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan)
b. Standar Oprerasioanl Prosedur (SOP) yang berlum tersusun secara benar dan belum teraplikasinya pada seluruh bidang kegiatan.
c. Belum tersusunya SPIP dalam Pelaksanaan Pelayanan

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan

hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan

4. **Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang**.

   Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya Kekuatan, Kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada

   A. Kekuatan

   1) Adanya dukungan anggaran
   2) SDM Aparatur meskipun masih terdapat kelemahan tetapi secara umum dapat melayani dengan baik
   3) Sarana dan Parasarana pendukung pelayanan
   4) sinergitas dan soliditas aparatur

   B. Kelemahan

   1) Sarana dan Prasarana perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana baru
   2) Kapasitas SDM Aparatur
   3) Standar Operasional Prosedur yang masih belum lengkap
   4) Pelimpahan Kewenangan urusan Pemerintahan dari Bupati kecamatan yang perlu pembaharuan diseuaikan dengan potensi masing – masing Kecamatan

   C. Tantangan

   1) Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat
   2) Sebagian masyarakat masih belum memahami atau belum mengetahu tentang SOP pelayanan
   3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih
   4) Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang)
   5) Sarana dan Prasaran pelayanan Cikancung khusunya dalam pelayanan Umum dan perizinan yang bukan kewenangan Kecamatan

D. Peluang

1) Antusiasme masyarakat terhadap perencanaan mendukung Kegiatan Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
2) Antusiame masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak)
3) Kordinasi dengan pemerintah Desa masih terjalin dengan baik.

5. Formulasi isu – isu penting

Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catata strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain :

1) Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada Bimtek dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemkab
2) Melaksanakan Pembinanan peningkatan kapasitas melalui Sosialisasi Perundang – undangan kaitan dengan Tugas dan Fungsi Aparatur
3) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja intern secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan
4) Penyusunan SOP secara lengkap untuk tiap bidang dan sub bidang
5) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi Kependudukan
6) Meningkatkan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan urusan pemerintahan dari bupati secara terukur dan sesuai ketentuan
7) Memfasilitasi adanya pelayanan terpadu yang melayani Pembuatan KTP, KK, Perizinan, Perpustakaan dan pelayan terpadu tersebut Dinas terkait yang memberikan layanan publik hadir langsung melayani di Kecamatan

2.4 Review terhadap Rencana Kerja RKPD

1. Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Membandingkan Rencana Kerja RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.

Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan Rencana Kerja RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan,
Terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara Rencana Kerja RKPDl dengan hasil analisis kebutuhan, hal tersebut

Perbedaan Nilai Pagu Rencana Kerja Dengan Hasil Analisis
Pada Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Pagu Awal	Hasil Analisis Kebutuhan	Alasan Perbedaan Pagu Induikatif
		Pagu Indikatif	Pagu Indikatif	
1	**KECAMATAN**	**4.571.054.000**	**5.561.740.000**	Berdasarkan Analisa kebutuhan anggaran Kecamatan Cikancung, dirasa perlu ada penambahan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Juga Anggaran yang diperlukan
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**4.421.054.000**	**5.326.740.000**	
3	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**56.300.000**	**56.300.000**	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.150.000	3.150.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.150.000	53.150.000	
7	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.031.615.000**	**4.725.351.000**	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.025.115.000	4.715.351.000	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	3.500.000	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.000.000	4.000.000	
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000	2.500.000	
12	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**34.000.000**	**138.240.000**	

13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	115.000.000
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	5.000.000
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000	3.000.000
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		5.040.000
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu		
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000	10.200.000
20	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**288.139.000**	**325.434.000**
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	10.005.000	11.000.000
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	278.134.000	314.434.000
24	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**11.000.000**	**81.415.000**
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11.000.000	15.000.000
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	3.000.000
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	63.415.000
28	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**65.000.000**	**135.000.000**
29	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**65.000.000**	**135.000.000**
30	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		

31	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	65.000.000	135.000.000
32	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**0**	**0**
33	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**0**	**0**
34	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
35	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**20.000.000**	**20.000.000**
36	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**20.000.000**	**20.000.000**
37	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20.000.000	20.000.000
38	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**25.000.000**	**25.000.000**
39	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25.000.000**	**25.000.000**
40	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25.000.000	25.000.000
41	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**40.000.000**	**55.000.000**
42	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**40.000.000**	**55.000.000**

43	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		15.000.000	
44	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			
45	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	30.000.000	30.000.000	
46	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			
47	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	10.000.000	10.000.000	

2. Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan

Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD tahun 2022

Kabupaten Bandung

No	PAGU RENJA AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	KECAMATAN				4.571.054.000	KECAMATAN				5.561.740.000	Berdasarkan Analisa kebutuhan anggaran Kecamatan Cikancung, dirasa perlu ada penambahan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Juga Anggaran yang diperlukan
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Cikancung	Nilai Akip	68	4.421.054.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Cikancung	Nilai Akip	68	5.326.740.000	
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Cikancung	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	56.300.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Cikancung	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	56.300.000	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cikancung	Jumlah dokumen Renja	2 dokumen	3.150.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cikancung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.150.000	
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Cikancung	Jumlah dokumen DPA			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec. Cikancung	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Cikancung	Jumlah dokumen LKIP PD yang diselesaikan secara tepat waktu	2 dokumen	53.150.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	53.150.000
7	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**4.031.615.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**4.725.351.000**
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cikancung	Jumlah Bulan dalam pembayaran Gaji dan tunjangan	12 Bulan	4.025.115.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cikancung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang	4.715.351.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cikancung	Jumlah laporan realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu	-	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.500.000
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Cikancung	Jumlah laporan rekonsiliasi keuangan bulanan yang diselesaikan secara tepat waktu	2 dokumen	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.000.000

11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Cikancung	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran yang diselesaikan secara tepat waktu	1 dokumen	2.500.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Cikancung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.500.000
12	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**34.000.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**138.240.000**
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cikancung	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cikancung	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli		
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cikancung	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	44 Jenis	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cikancung	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14 Paket	115.000.000
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Cikancung	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	30 Jenis	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Cikancung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Paket	5.000.000
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Cikancung	Jumlah satuan barang yang dicetak dan digandakan	14 Jenis	3.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Cikancung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.000.000
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Cikancung	Jumlah bahan bacaan yang dibeli			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Cikancung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Paket	5.040.000
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Cikancung	Jumlah Tamu yang mendapatkan makanan dan minuman			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		

19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cikancung	Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi di dalam daerah/luar daerah	40 OK	6.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	10.200.000
20	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**288.139.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**325.434.000**
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Cikancung	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Cikancung	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar		
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Kec. Cikancung	Jumlah bulan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	10.005.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	11.000.000
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cikancung	Jumlah Bulan Pembayaran Tenaga Administrasi dan pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	278.134.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	314.434.000
24	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**11.000.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**81.415.000**
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cikancung	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 unit	11.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cikancung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	15.000.000

26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cikancung	Jumlah peralatan kerja yang diservis/diperbaiki	-	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cikancung	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	3.000.000
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cikancung	Jumlah Ruangan kantor yang dipelihara/direhab	-	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cikancung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	63.415.000
28	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Cikancung**	**IKM**	**70%**	**65.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Cikancung**	**IKM**	**70%**	**135.000.000**
29	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Cikancung**	**Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**65.000.000**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Cikancung**	**Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**135.000.000**
30	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Cikancung	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Cikancung	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		
31	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Cikancung	Jumlah Peserta Pembinaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	200 OK	65.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	135.000.000
32	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Cikancung**	**IKM**	**70%**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Cikancung**	**IKM**	**70%**	**0**

33	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**0**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**0**
34	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cikancung				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cikancung	Jumlah Pegawai Kecamatan yang menghadiri Musdes		
35	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Cikancung**	**IKM**	**70%**	**20.000.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Cikancung**	**IKM**	**70%**	**20.000.000**
36	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Prosentase Terciptanya Sinergitas dan koordinasi Trantib**	**100%**	**20.000.000**	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Prosentase Terciptanya Sinergitas dan koordinasi Trantib**	**100%**	**20.000.000**
37	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Cikancung	Jumlah Peserta/personil dalam Kegiatan sinergitas dan koordinasi dalam Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan kejahatan	85 OK	20.000.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	20.000.000
38	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Cikancung**	**IKM**	**70%**	**25.000.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Cikancung**	**IKM**	**70%**	**25.000.000**

39	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**25.000.000**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**25.000.000**
40	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Cikancung	Jumlah Peserta dalam Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	85 OK	25.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	85 Orang	25.000.000
41	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Cikancung**	**IKM**	**70%**	**40.000.000**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Cikancung**	**IKM**	**70%**	**55.000.000**
42	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**40.000.000**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**55.000.000**
43	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Cikancung	Jumlah Peserta yang Mengikuti Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Pendayaagunaan Aset Desa			Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Cikancung	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	15.000.000

44	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Cikancung	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Cikancung	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		
45	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Cikancung	Jumlah peserta yang berperan dalam perencanaan dan pembangunan (Musrenbang)	120 OK	30.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Cikancung	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	30.000.000
46	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cikancung	Jumlah Peresta dalam Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cikancung	Jumlah Peresta dalam Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan		
47	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Cikancung	Jumlah Pegawai yang melaksanakan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	45 OK	10.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Cikancung	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	45 OK	10.000.000
					150.000.000					**235.000.000**
					4.571.054.000					**5.561.740.000**

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakiklan dari Desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Soial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur.

Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten

Tingkat kesesuaian usulan dari Desa yang diusulakan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbangbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan.

Daftar skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan

Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait.

Tabel 2.5 (TC 32)
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2022
Kabupaten Bandung

No	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	**KECAMATAN**				**5.561.740.000**	Berdasarkan Analisa kebutuhan anggaran Kecamatan Cikancung, dirasa perlu ada penambahan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Juga Anggaran yang diperlukan
2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Kec. Cikancung**	**Nilai Akip**	**68**	**5.326.740.000**	
3	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**56.300.000**	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cikancung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	3.150.000	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	53.150.000	
7	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**4.725.351.000**	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cikancung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang	4.715.351.000	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.500.000	

10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	4.000.000
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Cikancung	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	2.500.000
12	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**138.240.000**
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Cikancung	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang dibeli		
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Cikancung	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	14 Paket	115.000.000
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. Cikancung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10 Paket	5.000.000
16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Cikancung	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.000.000
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Cikancung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Paket	5.040.000
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	10.200.000

20	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**325.434.000**
21	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Cikancung	Jumlah penerimaan surat masuk dan pembuatan surat keluar		
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	11.000.000
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	314.434.000
24	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**81.415.000**
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Cikancung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 unit	15.000.000
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cikancung	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7 unit	3.000.000
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Cikancung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	63.415.000
28	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kec. Cikancung**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100%**	**135.000.000**
29	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Cikancung**	**Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**135.000.000**
30	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Cikancung	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah		

31	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	135.000.000
32	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Kec. Cikancung**	**PEMBERDAYAANPELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**0**
33	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**0**
34	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cikancung	Jumlah Pegawai Kecamatan yang menghadiri Musdes		
35	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Kec. Cikancung**	**PERSENTASE PELAKSANAANKOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**70%**	**20.000.000**
36	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Prosentase Terciptanya Sinergitas dan koordinasi Trantib**	**100%**	**20.000.000**
37	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Cikancung	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan	20.000.000
38	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Kec. Cikancung**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**100%**	**25.000.000**
39	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**25.000.000**

40	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Cikancung	Jumlah Orang yang Mengikuti pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	85 Orang	25.000.000
41	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Kec. Cikancung**	**PERSENTASE PELAKSANAAN DESA YANG DIBINA**	**100%**	**55.000.000**
42	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Cikancung**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**55.000.000**
43	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Cikancung	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 dokumen	15.000.000
44	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Cikancung	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		
45	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Cikancung	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	30.000.000
46	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Cikancung	Jumlah Peresta dalam Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan		
47	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Cikancung	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	45 OK	10.000.000
					235.000.000
					5.561.740.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta

kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Peranan Kecamatan sangat Strategis, yaitu OPD yang menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan

   terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan,penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

Dukungan Program Program perangkat daerah (Kecamatan) Yang mendukung terhadap prioritas pembangunan kabupaten dan prioritas nasional

Prioritas Nasional	Program Nasional	Program Pembangunan Kabupaten Bandung	Program Perangkat Daerah (Kec. Cikancung)
Pembanguan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Mempercepat pengurangan kemiskinan	Program jaminan sosial masyarakat	
		Program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan	

Prioritas Nasional	Program Nasional	Program Pembangunan Kabupaten Bandung	Program Perangkat Daerah (Kec. Cikancung)
		kesejahteraan sosial masyarakat	
	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat	Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	
		Program peningkatan derajat kesehatan penduduk	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
	Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Program peningkatan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Program Pendidikan Menengah
	Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (RAKSA PERMUKIMAN)	
	Meningkatkan tata kelola layanan dasar	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
		Program peningkatan standar penanganan penanggulangan bencana	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
		Program penanggulangan banjir	
		Program optimalisasi perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Meningkatkan konektivitas	Program peningkatan kualitas pelayanan transportasi	
	Mengembangkan telekomunikasi dan informatika		
	Mengembangkan pusat kegiatan ekonomi di wilayah timur dan pengambangan pembangunan desa	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
	Melaksanakan pembangunan daerah afirmasi		
	Melaksanakan pembangunan konektivitas untuk mendukung pembangunan sektor unggulan hulu-hilir perikanan		
Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif	Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana	Program pengembangan pertanian berdaya saing berbasis organik	
		Program optimalisasi jaringan irigasi	
	Mendorong percepatan	Program pengembangan produktivitas koperasi,	

Prioritas Nasional	Program Nasional	Program Pembangunan Kabupaten Bandung	Program Perangkat Daerah (Kec. Cikancung)
	peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikaniklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi	industri kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif	
		Program peningkatan efektivitas investasi	
	Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan	Program pengembangan dan jasa yang kompetitif	
		Program pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan daerah	
	Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan	Program peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal	
	Mengembangan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melaui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan		
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	Meningkatkan produksi energi primer		
	Meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi		
	Meningkatkan aksesibilitas air		
	Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik		
	Mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri	Program pemantapan kemandirian pangan	
	Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan		
	Memperkuat distribusi dan		

Prioritas Nasional	Program Nasional	Program Pembangunan Kabupaten Bandung	Program Perangkat Daerah (Kec. Cikancung)
	stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat		
	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi		
	Memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air	Program konservasi sumber daya alam	
	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata		
	Mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS		
	Meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (RAKSA SAMPAH & ALAM)	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
	Meningkatkan kesadaran sumberdaya air		
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Meningkatkan kamtibmas dan keamanan siber	Program peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban wilayah	Program pengembangan wawasan kebangsaan
	Menjamin kesuksesan pemilu		Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
	Memperkuat pertahanan wilayah nasional		
	Meningkatkan Kepastian hukum dan reformasi birokrasi	Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Memperkuat efektivitas diplomasi	Program peningkatan profesionalisme birokrasi	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Program peningkatan disiplin aparatur
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga Tujuan merupakan hal yang sangat Penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah.

1. **Prioritas Pembangunan Tahun 2022**

Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap capaian Visi dan Misi, OPD Kecamatan secara bersama melaksanakan Misi dari Kabupaten Bandung dan kaitan dengan misi tersebut Kecamatan Cikancung melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran yang berkorelasi dan berorioentasi pada Visi dan Misi Kabupaten bandung sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah diterbitkan Ketentuan Peraturan berupa Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep. 580 -Adpem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat**,** dengan jenis Pelimpahan antara lain : Rekomendasi, Koordinasi, Pengendalian, fasilitasi, Penyelenggaraan, dan Perizinan

A. Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Cikancung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah

1. ***Terwujudnya Kecamatan Cikancung Yang maju dan mandiri***
   dalam arti bahwa Kecamatan Cikancung mempunyai Tujuan untuk maju dalam berbagai bidang dan dapat mengatasi permasahan secara mandiri.sesuai dengan Tugas dan fungsinya.
2. ***Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Internal***
   Lebih baiknya Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan dengan meningkatnya kemampuan dan daya dukung sumber daya untuk melaksanakan perogram kegiatan guna mencapai sasaran yang diinginkan.
   Untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan Sasaran – sasaran yang merupakan satu Kesatuan yang dapat mendorong terciptanya Pelayanan yang optimal di Kecamatan Cikancung

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksankan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan

Sasaran – sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melaui Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis.

Adapun Sasaran Renja Kecamatan Cikancung :

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal

TABEL 3.1

TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR

NO	TUJUAN	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022
1	Terwujudnya Kecamatan Cikancung Yang Maju dan mandiri	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,8
2	Meningkatnya Kualitas Dan Kapabilitas Internal	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Internal	2	Nilai Lakip Kecamatan Cikancung	68
			3	Presentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi Baik	80%

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, hendaknya memperhatikan Misi Kabupaten Bandung yang sampai saat penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini belum terumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bandung.

Dengan Misi yang akan diemban OPD Kecamatan guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, maka Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada Kepmendagri 050_5889 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Kabupaten-Kota dan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program/kegiatan/Sub Kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Cikancung

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung,

Kecamatan Cikancung dalam perencanaan Tahun 2022 akan melaksanakan 6 Program, 10 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan

Kesesuaian Rencana Kerja dengan hasil analisis Kebutuhan terdapat penyesuaian mengingat pada saat penyusunan Renja telah dilakukan analisis kebutuhan, dan secara umum belum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2023 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Cikancung dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Cikancung pada Tahun 2022 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat Stap harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Cikancung Tahun 2022 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2022 dan prakiraan maju Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.2. di BAB III (pada halaman sebelumnya)

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2022 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

TC. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Bandung

OP. Kecamatan Cikancung

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
								Target Capaian	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian	Pagu Indikatif
7	**01**				**KECAMATAN**				**5.561.740.000**	APBD	disesuaikan		**5.871.592.250**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akip**	**Kec. Cikancung**	**68**	**5.326.740.000**	**APBD**		**68,30**	**5.537.618.130**
7	**01**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Cikancung**	**100%**	**56.300.000**	**APBD**		**100%**	**55.816.400**
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Cikancung	2 dokumen	3.150.000	APBD		2 dokumen	9.136.400
7	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Cikancung			APBD		2 dokumen	11.002.000
7	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Cikancung	1 Laporan	53.150.000	APBD		2 Laporan	35.678.000
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Cikancung**	**100%**	**4.725.351.000**	**APBD**		**100%**	**4.855.982.745**

7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Cikancung	300 Orang	4.715.351.000	APBD		300 Orang	4.842.982.745
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Cikancung	1 Laporan	3.500.000	APBD		1 Laporan	3.000.000
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec. Cikancung	12 Laporan	4.000.000	APBD		12 Laporan	6.000.000
7	01	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec. Cikancung	1 dokumen	2.500.000	APBD		1 dokumen	4.000.000
7	**01**	**01**	**2,02**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Prosentase BMD dalam Keadaan baik**	**Kec. Cikancung**	**0%**	**0**	**APBD**		**100%**	**15.000.000**
7	01	01	2,02	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Kec. Cikancung			APBD		1 Laporan	15.000.000
7	**01**	**01**	**2,03**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase rata-rata capaian SKP ASN PD yang memiliki nilai**	**Kec. Cikancung**	**0%**	**0**	**APBD**		**100%**	**12.000.000**
7	01	01	2,03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Cikancung			APBD		26 Paket	10.000.000
7	01	01	2,03	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Cikancung			APBD		15 OK	2.000.000
7	**01**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Cikancung**	**0%**	**138.240.000**	**APBD**		**100%**	**66.138.690**
7	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi listrik/penerangan yang disediakan	Kec. Cikancung			APBD		4 Paket	3.000.000

7	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Cikancung	14 Paket	115.000.000	APBD		14 Paket	30.000.000
7	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kec. Cikancung	10 Paket	5.000.000	APBD		10 Paket	2.500.000
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik Kantor yang disediakan	Kec. Cikancung			APBD		10 Paket	2.500.000
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Cikancung	2 Paket	3.000.000	APBD		3 Paket	5.778.690
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Cikancung	2 Paket	5.040.000	APBD		-	0
7	01	01	2,06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kec. Cikancung	0	0	APBD		2 Paket	3.000.000
7	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cikancung	-	0	APBD		40 Laporan	4.000.000
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Cikancung	40 Laporan	10.200.000	APBD		4 Laporan	15.360.000
7	**01**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**Kec. Cikancung**			**APBD**		**100%**	**88.000.000**
7	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec. Cikancung			APBD		2 Unit	54.800.000
7	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	**Kec. Cikancung**			APBD		2 Paket	16.290.600
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Cikancung			APBD		4 Unit	16.909.400

7	**01**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Cikancung**	**100%**	**325.434.000**	**APBD**		**100%**	**297.951.545**
7	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Cikancung	0	0	APBD		12 Laporan	3.000.000
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan pembayaran jasa layanan komunikasi, air dan listrik yang disediakan	Kec. Cikancung	12 Laporan	11.000.000	APBD		12 Bulan	37.471.545
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Cikancung	12 Laporan	314.434.000	APBD		12 Bulan	257.480.000
7	**01**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Cikancung**	**100%**	**81.415.000**	**APBD**		**100%**	**146.728.750**
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Cikancung	7 unit	15.000.000	APBD		7 unit	9.000.000
7	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Cikancung	7 unit	3.000.000	APBD		7 unit	3.000.000
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Cikancung	1 unit	63.415.000	APBD		1 unit	134.728.750
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**IKM**	**Kec. Cikancung**	**70%**	**135.000.000**	**APBD**		**100%**	**113.350.400**
7	**01**	**02**	**2,02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan**	**Kec. Cikancung**	**100%**	**135.000.000**	**APBD**		**100%**	**10.000.000**

7	01	02	2,03	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Cikancung			APBD		1 Laporan	10.000.000
7	**01**	**02**	**2,03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kec. Cikancung**		**0**	**APBD**		**100%**	**10.000.000**
7	01	02	2,03	01	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/ atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec. Cikancung			APBD		1 dokumen	10.000.000
7	**01**	**02**	**2,04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Cikancung**	**100%**	**135.000.000**	**APBD**		**100%**	**93.350.400**
7	01	02	2,04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Perizinan Non Usaha yang dilaksanakan	Kec. Cikancung			APBD		1 dokumen	15.000.000
7	01	02	2,04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Cikancung	4 Laporan	135.000.000	APBD		4 Laporan	78.350.400
7	**01**	**03**	**0**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**Kec. Cikancung**		**0**	**APBD**		**100%**	**45.412.400**
7	**01**	**03**	**2,01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec. Cikancung**			**APBD**		**100%**	**6.000.000**

7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Cikancung			APBD		5 Lembaga	6.000.000
7	**01**	**03**	**2,03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kec. Cikancung			APBD		**100%**	**39.412.400**
7	01	04	2,03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kec. Cikancung			APBD		5 Lembaga	24.412.400
7	01	04	2,03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Cikancung			APBD		1 Laporan	15.000.000
7	**01**	**04**	**0**		**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**IKM**	**Kec. Cikancung**	**70%**	**20.000.000**	**APBD**		**100%**	**40.000.000**
7	**01**	**04**	**2,01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Prosentase Terciptanya Sinergitas dan koordinasi Trantib**	**Kec. Cikancung**			**APBD**		**100%**	**10.000.000**
7	01	04	2,01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Cikancung			APBD		1 Laporan	10.000.000
7	**01**	**04**	**2,02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Prosentase Terciptanya Sinergitas dan koordinasi Trantib**	**Kec. Cikancung**	**100%**	**20.000.000**	**APBD**		**100%**	**30.000.000**
7	01	04	2,02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Cikancung	1 Laporan	20.000.000	APBD		1 Laporan	30.000.000

7	**01**	**05**	**0**		**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**IKM**	**Kec. Cikancung**	**70%**	**25.000.000**	**APBD**		**100%**	**68.000.000**
7	**01**	**05**	**2,01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Cikancung**	**100%**	**25.000.000**	**APBD**		**100%**	**68.000.000**
7	01	05	2,01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan kebangsan dan Ketahanan Nasional	Kec. Cikancung			APBD		40 Orang	10.000.000
7	01	05	2,01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras,dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	Kec. Cikancung	85 Orang	25.000.000	APBD		85 Orang	20.000.000
7	01	05	2,01	06	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Keacamatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Keacamatan	Kec. Cikancung			APBD		1 Dokumen	38.000.000
7	**01**	**06**	**0**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**IKM**	**Kec. Cikancung**	**70%**	**55.000.000**	**APBD**		**100%**	**67.211.320**
7	**01**	**06**	**2,01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Cikancung**	**100%**	**55.000.000**	**APBD**		**100%**	**67.211.320**
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Cikancung			APBD		1 dokumen	10.742.320

7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Cikancung	1 dokumen	15.000.000	APBD		1 dokumen	15.000.000
7	01	06	2,01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawarahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Cikancung			APBD		1 dokumen	11.469.000
7	01	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Cikancung	1 dokumen	30.000.000	APBD		45 OK	30.000.000
7	01	06	2,01	12	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Cikancung	45 OK	10.000.000	APBD			

Cikancung, 12 Juli 2022

CAMAT CIKANCUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KEC. CIKANCUNG

MAKSUM, S.Sos
NIP. 19640722 198403 1 002

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2022. RKPD Perubahan Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada kebutuhan dan Pertimbangan lain berdasarkan pengalaman atau history Rencana Kerja pada tahun 2022 dengan demikian ada keselarasan antara prioritas kabupaten dengan prioritas Kecamatan Cikancung maupun nasional. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Cikancung dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2022.

Dengan disusunnya Rancangan Perubahan Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Meningkatkan Pelayanan Publik
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi, sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Cikancung dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus dihapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung.

Cikancung, 01 Agustus 2022

CAMAT CIKANCUNG

M A K S U M

BUPATI BANDUNG

H M DADANG SUPRIATNA

Formulir E. 70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat daerah
Kabupaten Bandung

No	Jenis Kegiatan	Hasil pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan Tim Penyusun renja Perangkat daerah dan Penyusun Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat daerah Kabupaten/Kota.	√			
4.	Mengkaji hasi evaluasi renja - Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra - Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting peyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indiklator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupatem/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Cikancung, 01 Agustus 2022

CAMAT CIKANCUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KEC. CIKANCUNG

M A K S U M. S.Sos
Pembina Tk I
NIP. 19640722 198403 1 002



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 157 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJMD dan mengacu RKP.
11. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk peride 1 (satu) tahunan.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD.

BAB II
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN CIKANCUNG

Pasal 2

(1) Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari perubahan RKPD Tahun 2022 dan

penjabaran dari Renstra Kecamatan Cikancung Tahun 2016-2021.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh Kecamatan Cikancung dalam menyusun Perubahan RKA Kecamatan Cikancung Tahun 2022.

(3) Rincian Perubahan Renja Kecamatan Cikancung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Cikancung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat:

a. latar belakang dan dasar hukum;
b. hasil evaluasi Renja Kecamatan Cikancung sampai dengan triwulan II tahun berjalan;
c. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
d. penutup serta lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Cikancung.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja Kecamatan Cikancung dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2022 dilaksanakan untuk:
    a. penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
    b. laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
    c. menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja Kecamatan Cikancung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan RKA PD.

(2) Perubahan Renja Kecamatan Cikancung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra Kecamatan Cikancung.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA
KECAMATAN CIKANCUNG

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja Kecamatan Cikancung meliputi;

a. semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab Kecamatan Cikancung sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
b. target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD;
c. perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada huruf b dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara Kecamatan Cikancung dengan DPRD; dan
d. perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja Kecamatan Cikancung triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV
PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada:

a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang penyusunan Perubahan Renja PD.
b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2022; dan
c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan II tahun berkenaan

Pasal 8

Rincian dokumen Perubahan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Kepala Kecamatan Cikancung melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Cikancung yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja Kecamatan Cikancung.
(3) Kepala Kecamatan Cikancung melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja Kecamatan Cikancung periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 01 Agustus 2022

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIKANCUNG

Jalan Raya Cikancung –Ciluluk No 06 Cikancung Kode Pos : 40396 Telp/Fax (022)7948228
Kabupaten Bandung Provinsi Jawa barat
Email: kec.cikancung@bandungkab.go.id website: kecamatancikancung.bandungkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIKANCUNG

NOMOR : 800 / Kep. 14 / II / 2022
LAMPIRAN : II (DUA)

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

CAMAT CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2022 - 2026, maka setiap Perangkat Daerah (PD) perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA)

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Bersih yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data indonesia;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasipembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

10. Peraturan Presiden Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kebupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 12);

13 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

14 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22)

15 Surat Edaran Bupati bandung Nomor : 050 / 474 / Bappeda tentang Penyampaian usulan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD sampai dengan penetapan Renja SKPD Tahun 2022;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIKANCUNG TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2022 adalah sebagaimana telah dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Camat Cikancung Kabupaten Bandung ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memuat visi, misi, strategis, kebijakan, program dan rencana kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.

KETIGA : Peraturan Camat Cikancung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cikancung
Pada tanggal : 06 Februari 2022

CAMAT CIKANCUNG,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KEC. CIKANCUNG

M A K S U M, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19640722 198403 1 002

Lampiran I : Surat Keputusan Camat Cikancung

Nomor : 800 / Kep. 14 / II / 2022
Tanggal : 06 Februari 2022
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Kecamatan Cikancung

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

Jabatan dalam Tim		**Nama/Jabatan**
Penanggungjawab	:	Sekretaris Kecamatan Cikancung
Ketua	:	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan
		1 Kasi Pemerintahan
		2 Kasi Pemberdayaan Masyarakat
		3 Kasi Pembangunan
		4 Kasi Sosial Budaya
		5 Kasi Trantibum
		6 Kasubag Umpeg

Ditetapkan di : Cikancung
Pada tanggal 06 Februari 2022

CAMAT CIKANCUNG,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KEC. CIKANCUNG

M A K S U M, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19640722 198403 1 002

Lampiran II : Surat Keputusan Camat Cikancung

Nomor : 800 / Kep. 14 / II / 2022
Tanggal : 06 Februari 2022
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Kecamatan Cikancung

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN CIKANCUNG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

- **PENANGGUNGJAWAB**
  - Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan olehtim penyusun Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2022;
  - Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2022;
  - Menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepada Camat Cikancung
  - Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

- **KETUA:**
  - Mengkoordinasikan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2022;
  - Membantu penanggungjawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepadatim dalam penyusunan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2022;
  - Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun kepadapenangungjawab penyusunan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2022;
  - Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.

- **ANGGOTA:**
  - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Cikancung tahun lalu berdasarkan Renstra Kecamatan Cikancung;
  - Melakukan análisis terhadap pencapaian dan perencanaan kinerja program/kegiatan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2022;
  - Melakukan telaahan terhadap isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi;
  - Melakukan telaahan terhadap Rancangan RKPDTahun 2022;
  - Merumuskan tujuan, sasaran dan program kegiatan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2022;
  - Merumuskan kegiatan prioritas Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2022;
  - Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Renja bidangnya masing-masing pada Kecamatan Cikancung;

- Melaksanakan penyempurnaan Renja Kecamatan Cikancung atas hasil telaahan,koreksi dan masukan bidangnya masing-masing pada Kecamatan Cikancung;
- Menyesuaikan dokumen rancangan Renja Kecamatan Cikancung Tahun 2022 sesuai dengan dokumen RKPD tahun 2022 yang telah ditetapkan;
- Bertanggungjawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;